



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN PISANGAN BARU**

Jl. Pisangan Baru Utara – Telepon 021- 8505372 - Faksimile 021-8516161
E-mail : kel_pisanganbaru@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 13110

Nomor : 481 / Hm. 10.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Usulan Daftar
Informasi yang Dikecualikan
(DIK) Tahun 2023

31 Agustus 2023

Kepada
Yth. Plt. Kepala Dinas
Komunikasi, Infomatika
Dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta
Di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat dari Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 1552/HM/10.02 Tanggal 24 Juli 2023 Perihal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK), dengan ini disampaikan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Pisangan Baru
Kota Administrasi Jakarta Timur,



Wahyu Dwi Kesdianto. S.STP, MP
NIP. 198109231999121001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Matraman;

Lampiran : Surat Lurah Kelurahan Pisangan Baru
 Nomor : 481/HM.0.02
 Tanggal : 31 Agustus 2023

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 KELURAHAN PISANGAN BARU**

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat / Unit/ Satker yang menguasai informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Dasar / alasan Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan		Masa retensi	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Disposisi Surat Pimpinan	Sekretaris Kelurahan	Hardcopy	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I	Terbuka Apabila Ada Perintah Pengabdian Atau Lembaga Pemerintah Secara Tertulis	Dapat Mengganggu Proses Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Publik	Sesuai dengan isi Surat Dinas	Menjaga Objektivitas Proses Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Publik
2	Nota Dinas	Sekretaris Kelurahan	Hardcopy	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I	Terbuka Apabila Ada Perintah Pengabdian Atau Lembaga Pemerintah Secara Tertulis	Dapat Mengganggu Proses Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Publik	Sesuai dengan isi Surat Dinas	Menjaga Objektivitas Proses Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Publik

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat / Unit / Satker yang menguasai informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Dasar / alasan Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan		Masa retensi	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Dokumen SPJ yang belum diaudit	Bendahara	Hardcopy	<p>A. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf B</p> <p>B. Putusan MA-RI Nomor 509 K/TUN/ 2013 : Mengingat Dokumen SPJ Hanyalah Tahapan Awal Dari Pembuatan Laporan Keuangan Yang Sifatnya Teknis</p>	<p>31 Tahun Atau Terbuka Apabila Mendapat Perintah Tertulis Dari Pengadilan / Lembaga Pemerintah</p>	<p>A. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan HAK Atas Kekayaan Intelektual Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Usaha Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>Sampai dengan telah diaudit</p>	<p>Mengamankan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Menghindari Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat / Unit/Satker yang menguasai informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Dasar / alasan Pengecualian	Konsekuensi/Perimbangan		Masa retensi	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Data pribadi pegawai Kelurahan Pisangan Baru	Sekretaris Kelurahan	online/ offline	Mengandung rahasia pribadi	berpotensi mengungkap rahasia pribadi	Data pribadi pegawai Kelurahan Pisangan Baru	-	online/ offline


 LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,
 WAHYU DWI KESDIANTO, S.STP.MP
 NTP: 198109231999121001